

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 23 Januari 2019
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Membahas evaluasi terhadap pengelolaan perbatasan - Membahas program dan rencana kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Ketua Rapat	: Dr. Nihayatul Wafiroh, MA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 22 dari 45 Anggota Komisi II DPR RI B. Plt. Sekretaris BNPP C. Plt. Kepala BPIP

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Plt. Sekretaris BNPP dan Plt. Kepala BPIP dengan agenda membahas evaluasi terhadap pengelolaan perbatasan dan membahas program dan rencana kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila , pada hari Rabu, 23 Januari 2019, dibuka pada pukul 13.40 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Nihayatul Wafiroh, MA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI mendukung Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila untuk menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

2. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap serapan anggaran dan realisasi program Tahun anggaran 2018
 - a. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai 17,59 % sebesar Rp7.819.493.865,-
 - b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mencapai 86,05% sebesar Rp175.151.761.567,-Selanjutnya Komisi II DPR RI meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk meningkatkan serapan anggaran dan kinerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Komisi II DPR RI mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk dapat meningkatkan sinergi antara K/L sehingga program pembangunan di wilayah perbatasan dapat maksimal hasilnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pertahanan keamanan negara.
4. Komisi II DPR RI mendukung penuh alokasi anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun Anggaran 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

Jakarta, 23 Januari 2019
KETUA RAPAT

ttd

DR. NIHAYATUL WAFIROH, MA
A-65